

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai rumusan alinea 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa tujuan bernegara yang diatur dalam konstitusi tak lain dan tak bukan untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerintahan yang adil. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan transparansi agar masyarakat tahu apa – apa yang akan diputuskan oleh negara harusnya partisipasi dan transparansi harus ada, kalau transparansi dijamin oleh pemerintah, berarti transparansi menjadi hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan maka hal tersebut dapat dirumuskan dalam good governance yaitu suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Dalam Rangka Menciptakan Transparansi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes, yaitu Pengelolaan JDIH dapat memberikan dorongan bagi terciptanya transparansi pemerintahan. Transparansi tata pemerintahan memiliki indikator-indikator yang berfungsi sebagai parameter dari pelaksanaan transparansi.

Penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang dalam pemerintahan telah melahirkan istilah e-government, singkatan dari electronic government. E-government sebagai usaha penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan dengan cara penyediaan pelayanan di berbagai bidang secara lebih baik, memberikan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel serta transparan. Pemerintah daerah harus lebih serius lagi mengelola situs web masing-masing termasuk JDIH sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik di tengah tuntutan akan pelayanan publik yang semakin meningkat.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di dalam mendorong terciptanya transparansi Pemerintah terlihat jelas di Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimana didalamnya memerintahkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyebarluaskan Produk Hukum. Hingga sampai tataran Peraturan yang paling rendah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes dan Pelaksanaannya untuk mendukung atau mendorong transparansi Pemerintah tercantum dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dimana salah satunya melakukan penyiapan produk – produk hukum untuk di publikasikan, yang tentunya setelah melalui proses pengumpulan dan menghimpun serta di perbanyak untuk keperluan umum atau masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci : e-governance, Jaringan Dokumen, Transparansi

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, the appropriate formulation of paragraph 4 of Law - Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Whereas the purpose of the state constitutional none other not to mensejahterakaan people through fair governance. In the form of a democratic country, people are very crucial in the implementation of governance necessary transparency so that people know what it is - what will be decided by the state should be participation and transparency must exist, if transparency is guaranteed by the government, meaning transparency becomes essential in the implementation of governance then it is can be formulated in good governance is a concept that refers to the process of decision making and implementation, which can be accounted for together.

In Order Creating Local Government Transparency in Brebes, namely JDIH Management can provide a boost for that the creation of transparency of governance. Transparency of governance have indicators that function as this parameter on the implementation of transparency.

The use of information technology as a support in government has spawned the term e-government, electronic government stands. E-government as a business use and utilization of information and communication technologies to improve the efficiency and effectiveness of government by way of the provision of services in various fields better, giving access to information to the wider public, and to make governance more accountable and transparent. The local government should be more serious in managing their respective web sites including JDIH as a form of transparency and public accountability in the demand for public services is increasing.

Network Management Documentation and Legal Information (JDIH) in pushing for greater transparency of government is evident in the Law - Law Public and Presidential Decree number 33 of 2012 on Network Management Documentation and Legal Information which there ordered the regional government both provincial and district / city to Product disseminate Law. Up until the level of regulation of the lowest namely the Regional Regulation No. 10 of 2011 regulating the Organizational Structure Legal Division Secretariat of Brebes and The exercise to support or encourage transparency of government stated in the decree Brebes No. 041 of 2011 on the translation of their roles, responsibilities, and functions of the Regional Secretariat Brebes where one of them to prepare a product - a product legal to be published, which of course after going through the process of gathering and collecting, and in multiply for public use or public need.

Keywords: e-governance, Documents Network, Transparency